**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pariwisata Berbasis Masyarakat di Lereng Merapi .**

**(Studi dan Kajian di Kawasan Rawan Bencana III Desa Kalibening, Kecamatan Dukun kabupaten Magelang)**

Muhamad Muhamad.

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

drmuhammad@ugm.ac.id

**INTISARI**

Lokasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berada di lereng gunung Merapi yang berjarak 8 km dan merupakan kawasan rawan bencana (KRB) kategori III. Tujuan utama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan tahun 2016-2019 melalui skema pengembangan desa binaan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan terhadap pembangunan di wilayahnya melalui pariwisata. Metode kajian ini *Focus Group Disscussion* (FGD) sebagai upaya menjaring dan menemukenali partisipatif masyarakat dalam dan wawancara terstruktur. Metode analisis partisipasi masyarakat menggunakan skala likert dengan skala 0 sampai 5 dengan menggunakan bobot skor yang bertujuan melihat faktor bentuk partisipasi dan manfaat partisipasi. Pendekatan deskriptif kuantitatif diharapkan mampu menggambarkan tingkat partisipatif masyarakat. Hasil analisis menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat sebesar 60% ikut berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata, sekitar 25% masyarakat ikut berpartisipasi karena tingkat kesadaran , sekitar 12% berpartisipasi tetapi tidak serius dan 3 % masyarakat tidak berpartisipasi. Kesimpulan bahwa masyarakat mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi dalam mendukung pembentukan desa wisata di kawasan rawan bencana.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Desa Wisata, Tangguh bencana.

**Latar Belakang**

Tema pariwisata berbasis pada masyarakat atau yang dikenal dengan (*Community Base Tourism)* sangatlah penting dan mendasar dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan. Melalui kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar pijakan yang akurat bagi pelaksanaan program-program pengembangan desa binaan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah pedesaan. Pengembangan desa binaan merupakan pilihan yang tepat dan strategis baik untuk kepentingan institusi maupun kepentingan bangsa dalam mewujudkan pembangunan nasional. Program ini diharapkan akan memberikan dampak positif, yaitu membina sumber daya manusia di perdesaan dengan pendekatan pendidikan dan pelatihan. Sedangkan dari sudut pembangunan nasional, desa merupakan tempat bermukimnya sebagian besar penduduk Indonesia. Sebanyak 90 % penduduk Indonesia hidup di perdesaan; maka membangun desa sama dengan membangun bangsa.

Keberadaan desa merupakan inti dalam menopang keutuhan dan kemajuan bangsa, jika mengabaikan masyarakat desa, maka akan sulit untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu masyarakat perdesaan harus diberdayakan sesuai dengan kondisi dan potensinya masing-masing. Untuk itu diperlukan adanya pengembangan desa binaan yang cocok baik bagi institusi maupun masyarakat. Pengembangan desa binaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dikelola melalui pengorganisasian yang dapat melibatkan semua unsur dan institusi mulai dari tingkat yang paling terkecil misal keluarga, RT, RW, Desa, Kecamatan, dan kabupaten, (2) dijalankan secara mandiri dan terus-menerus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, (3) program disusun melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitor dan evaluasi, serta tindak lanjut, (4) dikembangkan prinsip-prinsip kemitraan dengan stakeholders, dan (5) diarahkan untuk menjadi lembaga yang mampu memperkuat struktur sosial masyarakat desa.

Desa Kalibening Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang terletak di belahan selatan wilayah Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Dibagian sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tegalrandu Kecamatan Srumbung dan Barat berbatasan dengan Desa Wates, sedangkan dibagian sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber, sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Ngargomulyo. Desa dengan jumlah penduduk ± 2.895 jiwa terdiri dari laki-laki 1304 jiwa dan perempuan 1591 jiwa dan terdiri dari 897 KK, 9 RW dan 35 RT. yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai buruh petani, dimana luas wilayah Desa Kalibening yang sebesar 38.268Ha, hanya 63,8 % (427 Ha) saja yang menjadi lahan produktif untuk ditanami padi. Sedangkan 31,2 %nya (242,32 Ha) berupa lahan pertanian kering (tadah hujan) dan sisanya ditanami tanaman keras seperti sengon, jati, mahoni, mangga, pisang dan randu yang mana hasilnya hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Desa kalibening, terletak di sebelah barat gunung Merapi dengan jarak 6,8 Km dari puncak Gunung, sehingga termasuk dalam kawasan ring 1 atau KRB 3 daerah rawan bencana gunung merapi. Tinggi desa kalibening dari permukaan air laut adalah 650 mdl dengan suhu rata-rata 25˚- 27˚ C. Secara geografis memang desa kalibening memang terletak didaerah yang subur namun dengan kondisi perkembangan ahir-ahir ini banyaknya penambangan pasir liar di kawasan lereng merapi sehingga mengakibatkan rusaknya kawasan hutan didaerah lereng merapi sehingga ketersediaan air untuk pertanian yang dulunya melimpah sekarang ini menjadi sangat menurun bahkan dapat dikatakan kurang untuk memenuhi kebutuhan pertanian keadaan ini diperburuk dengan rusaknya bendungan dan saluran irigasi akibat banjir pada musim hujan. Rusaknya infrastruktur lainya seperti jalan baik jalan utama ataupun jalan dusun semakin memperburuk keadaan.

Karakteristik desa tersebut sangat rentan terhadap erupsi Merapi tetapi banyak sekali menyimpan daya tarik yang dapat dijadikan obyek wisata terutama keindahan lanskap dan budaya masyarakat. Pengembangan desa binaan yang merupakan program dan kegiatan yang ilakukan setiap tahun yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan untuk adaptasi dan mitigasi perusakan/ kerusakan lingkungan dan mampu memobilisasi masyarakat, pemerintah dan sektor bisnis untuk melaksanakan perbaikan dan penyelamatan secara berkelanjutan. Salah satu usaha terpenting antara lain, antara lain: a) desa ini sangat rentan terhadap kebencanaan terutama pada saat erupsi Merapi , karena jarak yang sangat dekat sekitar 6 km dari puncak gunung Merapi, b) desa ini memiliki karakteristik didalam merespon bencana erupsi gunung Merapi (tangguh bencana) dan memiliki dua desa saudara (village sister) , yaitu Desa Tanjung dan Desa Ngadikarto yang berada di kecamatan Muntilan. Kerjasama desa saudara tersebut terjalin pada tahun 2011 yang ditandatangi oleh penandatanganan *Memo of Understanding(MoU)* oleh ketiga kepala desa.

Posisi dan peran desa rintisan tangguh bencana merupakan respon terpenting di kawasan rawan bencana dan masyarakat telah mampu mengimplementasikannya secara berkelanjutan a) Posisi dan peran strategi kegiatan pariwisata di desa binaan merupakan bagian dari pengembangan wilayah secara terpadu didalam rangka pemberdayaan masyarakat, b) Pengembangan melalui kegiatan wisata didesa binaan merupakan hal kontekstual terhadap inisiatif dari masyarakat sekaligus merespon UU No 16 tahun 2014 tentang undang-undang perdesaan.

Program pengembangan desa binaan ini mengambil tema dengan memposisikan pengembangan sektor kegiatan pariwisata yang memiliki karakter dan nilai strategis yang memberikan justifikasi kuat sebagai agen pengembangan/ pembangunan wilayah dan masyarkat, bagi pengembangan kepariwisataan, yaitu : a) Posisi dan peran strategi pariwisata sebagai agen pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat di perdesaan, b) *Local resource based industry*; karakteristik industri pariwisata yang sangat ramah pada penyerapan sumber daya lokal serta sifatnya yang padat karya akan sangat efektif dalam menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha di daerah, c) Karakter keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha yang sangat tinggi, sehingga sektor pariwisata memiliki kemampuan yang sangat besar dalam menciptakan dampak ekonomi multi ganda bagi daerah dan masyarakat.

Atas dasar nilai strategis yang dimiliki tersebut diatas, maka posisi dan peran pariwisata sebagai alat yang efektif bagi pengembangan dan pembangunan wilayah, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan semakin jelas dan kuat. Menurut Barry, N., Barham, J., (2012), Pembangunan sektor pariwisata sebagai salah satu penanganan kebencanaan memiliki sejumlah dimensi fungsi dan tujuan, antara lain adalah kedudukannya sebagai sektor strategis sebagaimana disebutkan di atas adalah aspek pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata tangguh bencana .

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Aspek pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting mengingat masyarakat merupakan salah satu *stakeholders* dalam kegiatan pembangunan, selain pemerintah dan swasta. Sedemikian hingga manfaat dan tanggung jawab pembangunan kepariwisataan tidak saja bertumpu pada kedua unsur diatas, namun juga unsur masyarakat.

**Permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran**

Permasalahan utama yang dihadapi oleh kelompok sasaran adalah ketidak berdayaan masyarakat dalam menghadapi pasca erupsi gunung Merapi. Ketangguhan sosial, ekonomi dan budaya di daerah rawan bencana masih harus mendapat perhatian serius, yaitu melalui program pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dan atau penguatan kapasitas kelembagaan. Penguatan kapasitas ini sangat membantu percepatan pemulihan masyarakat pasca erupsi Gunung Merapi khususnya pada bidang sosial dan ekonomi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat. Kajian ini merupakan salah satu bentuk kepedulian, tanggung jawab dan kewajiban pihak akademisi untuk membantu pihak pemerintah dalam melakukan penanggulangan serta pemulihan bencana alam.

Menurut Ritchie, B.W.( 2000), penanggulangan bencana pada dasarnya bukanlah menjadi tugas dan tangung jawab pemerintah semata, namun menjadi tanggung jawab dan kewajiban masyarakat luas yang dilakukan melalui usaha mengantisipasi bencana melalui kekuatan yang berbasiskan masyarakat yaitu pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang bertumpu pada kemampuan sumber daya setempat (community disaster management).

Berlandaskan pada Peraturan yang berlaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dalam Bab IV Alokasi dan Peran Pelaku Kegiatan Penanggulangan Bencana mengenai peran dan potensi masyarakat, salah satunya yaitu perguruan tinggi atau lembaga penelitian disebutkan bahwa penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien jika dilakukan berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat. Maka diperlukan kontribusi pemikiran dari para ahli dari lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian adalah upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung terbentuknya aktifitas berwisata secara implementatif pascaerupsi Gunung Merapi di kawasan rawan bencana.

Menurut Bridges, William R., (1974) Bentuk pembangunan masyarakat perdesaan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan dan daerah rentan terhadap bencana salah satunya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Konsep ini mampu mendefenisikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Rendahnya keterampilan yang dimiliki masyarakat perdesaan mengakibatkan mereka tidak mampu mengenali apa yang dibutuhkan dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Peran aktif dan tingkat partisipatif pada pemberdayaan masyarakat khususnya melalui pengembangan desa binaan yang difasilitasi oleh UGM melalui P2KM sangat dibutuhkan untuk mengintervensi masyarakat dalam mengembangkan kemandirian. Peran pendamping dalam hal ini adalah pemercepat perubahan *(enebler),* pembangkit semangat (*encourager*), dan pendidik (educator). Sehingga secara bertahap, masyarakat akan menuju pada kemandirian. Masyarakat lokal, institusi-institusi lokal/ kemasyarakatan serta lembaga-lembaga non-pemerintah, merupakan faktor yang berperan menentukan pengembangan wilayah desa di masing-masing sesuai dengan karakteristik pengembangannya. Oleh karena itu, pendekatan didalam pengembangan masyarakat desa binaan menggunakan konsep *Community Based Strategic Planning.*

Mengingat hal tersebut, maka dalam rangka kegiatan pengembangan masyarakat binaan melalui pariwisata dilakukan secara terbuka, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan haknya, yakni memberikan masukan berupa informasi, data, tanggapan, saran-saran dan lain sebagainya. Rencana yang tersusun akan lebih aspiratif dan dapat mewadahi berbagai kepentingan setiap lapisan masyarakat. Pengembangan berbasis kemasyarakatan dapat digambarkan dalam bagan berikut :

**DAMPAK MANFAAT EKONOMI**

**PENGEMBANGAN/ IMPLEMENTASI**

**PARTISIPASI MASYARAKAT**

Memposisikan masyarakat sebagai subyek pengembangan yang berperan aktif dalam bentuk partisipatif

Peran dan posisi masyarakat dalam memperoleh nilai manfaat signifikan

Peran aktif masyarakat dalam peng. program serta pengelolaannya

Gambar 1 . Diagram pendekatan kemasyarakatan

Sumber: Konsep pemikiran, dari berbagai sumber, 2018

Suansri, P., (2003) memaparkan bahwa partisipatif pengembangan desa wisata diharapkan dapat mampu mendorong penguatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat dalam sektor sosial-budaya dan ekonomi dan pengelolaan sumber daya pariwisata berpedoman pada kemitraan dan kearifan lokal. Keberadaan desa wisata mampu merangsang kreativitas masyarakat untuk menggali, mengoptimalkan dan melestarikan potensi budaya yang ada, Suansri, P., (2003)

Sejalan dengan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Muhamad dan Prima. A. (2016) di desa wisata Pulesari, Desa Donokerto Kecamatan Turi menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya pariwisata berpedoman pada pemanfaatan potensi desa dan pelestarian budaya dan pelestarian dalam rangka mengkonservasi dan mempertahankan lanskap, Muhamad, Fandeli, C (2009). Kelembagaan desa wisata tersebut dapat berfungsi sebagai aktor yang berperan dalam pembangunan pariwisata. Keberadaan kelembagaan yaitu kelompok sadar wisata tersebut digunakan sebagai sarana memperkuat ikatan sosial-budaya masyarakat dalam upaya pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.

Faktor Pendorong Partisipasi menurut Setyawan B, Rahmi, D, (2007), Suansri, P., (2003) mengkategorikan lima kondisi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut yaitu adanya organisasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan, manfaat yang diperoleh, terdapat komitmen atau kewajiban untuk memberikan tanggapan serta ditunjang oleh adanya pengetahuan yang lebih baik. Organisasi yang mampu menarik minat pemuda harus berangkat dari kebutuhan dan minat pemuda akan isu tertentu. Selain itu, kelompok tersebut didukung oleh inisiator dengan reputasi yang baik, diterima dan menjadi figur di lingkungan organisasi kelompok masyarakat tersebut

Beberapa manfaat yang dihasilkan berdampak signifikan terhadap kemajuan masyarakat. Sementara itu, ancaman memberikan dorongan untuk terhindar dari hal-hal buruk yang mungkin dapat terjadi, Suansri, P., (2003) . Langkah antisipatif ini muncul dari dorongan yang bersifat moral, sosial, ekonomi maupun keagamaan. Komitmen dan kewajiban memberikan tanggapan merupakan kesediaan yang didorong oleh nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Kondisi terakhir yang dapat mendorong masyarakt berpartisipasi yaitu pengetahuan yang ada dan yang lebih baik. Informasi yang diterima individu akan sangat berpengaruh terhadap tindakan yang di pilihnya. Kecukupan penerimaan informasi akan memberikan stimulus positif bagi individu penerimanya.

Menurut Suansri, P., (2003), bentuk partisipasi yang dinamis pada masyarakat merupakan jenis kontribusi yang diberikan oleh partisipan dalam sebuah pelaksanaan kegiatan. Partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikelompokkan menjadi lima bentuk yaitu partisipasi ide, keterampilan, tenaga, harta benda dan uang, Haeruman, H.J.S., Eriyatno, (2002). Partisipasi ide atau gagasan merupakan kemampuan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman Baiquni, M, (2001). Partisipasi keterampilan merupakan ragam kemampuan untuk mengerahkan keterampilan dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, partisipasi tenaga khususnya tenaga kasar merupakan partisipasi yang bersifat manual bagi kegiatan pembanguna

**Metode Pelaksanaan**

Penelitian dilakukan secara bersamaan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif, dua pendekatan data yang terkumpul digabungkan dan dianalisis untuk kemudian diinterpretasi berdasarkan persamaan, perbedaan dan gabungan keduanya (Creswell, 2009: 213).Pendekatan penelitian yang utama menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam (*in-deep interview*). Sementara itu, pendekatan kuantitatif dengan alat skala Likert merupakan pendekatan pendukung dalam perolehan data.

Analisis partisipasi masyarakat melalui skala likert dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini skala Likert digunakan untuk mengukur sikap dan persepsi masyarakat tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pariwisata di kawasan rawan bencana.

Analisis ini menggunakan bobot *scoring* untuk melihat faktor bentuk partisipasi dan manfaat partisipasi, Arikunto, S., (2010). Pendekatan deskriptif kualitatif diharapkan mampu menggambarkan dan meringkas berbagai fenomena sosial budaya masyarakat di desa wisata. Metoda dan analisis ini merupakan bentuk partisipasi dari proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi perdesaan, dilakukan berulang-ulang, dan cepat, seperti penjelasan gamabr berikut:

**Pariwisata Berbasis Masyarakat**

**pengamatan kondisi lapangan untuk site analisis dan data primer maupun sekunder yang akan digunakan sebagai dasar pijakan informasi awal serta sebagai bahan pendukung guna pelaksanaan kegiatan tahap selanjutnya**

**kegiatan penggalian data berupa penyiapan rencana pelaksanaan kegiatan serta kompilasi data sebagai bahan pendukung dalam perumusan konsep dan analisis**

**menyusun penilaian , arahan dan strategi berdasarkan hasil , interview dan analisis-data primer dan sekunder berupa skala likert partisipasi yang diperoleh melalui alat analisis tertentu**

**PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT TANGGUH BENCANA**

**SURVEY DAN ANALISIS SITUASI**

**RUMUSAN MASALAH PENGOLAHAN DATA**

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**PENYUSUNAN REKOMENDASI**

Gambar 2 Diagram Lingkup Kegiatan Pokok

Sumber: Analisis, 2019

**Survey dan Analisis Situasi**

Creswell, J. W., (2010) menyebutkan aktifitas survey dapat dilakukan pada langkah awal sebelum aktifitas penelitian seutuhnya. Rencana pembentukan pariwisata berbasis pada masyarakat merupakan kegiatan serta kompilasi data dan informasi awal sebagai bahan pendukung dalam perumusan konsep dan analisis serta dalam pelaksanaan tahap kegiatan selanjutnya (survei dan kompilasi data lapangan. Analisis situasi dilakukan pada saat berjalannya program melalui skema pengembangan desa binaan tahun 2016-2018 dalam pengabdian kepada masyarakat . Sedangkan studi pustaka diperlukan untuk mendalami berbagai literatur yang berkaitan dengan topik studi, Arikunto, S., (2010) . Teknik yang digunakan adalah melalui pendalaman berbagai sumber informasi seperti buku, artikel, majalah, internet, dsb; serta mencermati model-model yang telah berjalan.

**Analisis Pembahasan**

Masyarakat pada kelompok sasaran memiliki hak untuk mengelola dan menikmati hasil dari adanya desa wisata. Masyarakat ini merupakan salah-satu aktor pengelola pariwisata baik secara perorangan maupun kelompok. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat dibawah koordinasi kelompok sadar wisata. Masyarakat mempunyai peran baik sebagai bagian dari pengurus Pokdarwis sebagai kelompok masyarakat maupun sebagai individu yang menjadi bagian dari masyarakat. Hubungan kontribusi Pokdarwis dengan pengelola lain merupakan fungsi koordinasi dan fungsi koreksi. Sementara itu, kontribusi ketiga aktor pengelola desa wisata merupakan fungsi operasional dalam pengelolaan desa wisata.

Tabel 1. . Bentuk Partisipatif dalam Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Sadar Wista.

|  |  |
| --- | --- |
| **Jabatan** | **Tugas dan Tanggung jawab** |
| Ketua I | * Dipilih oleh dan bekerja penuh untuk melayani kegiatan desa wisata, koordinasi, memberi informasi, promosi dan penjualan. * Membagi tugas secara adil dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan serta melaporkan hasil kegiatan kepada seluruh masyarakat. * Melaksanakan tugas-tugas lain berkenaan dengan desa wisata. * Merumuskan konsep pengembangan yang bersifat inovatif |
| Wakil Ketua/ | * Mengusahakan terciptanya manajemen organisasi serta pelaporan secara periodik. * Mengerahkan dan menetapkan kebijakan organisasi sesuai aspirasi masyarakat serta mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada masyarakat. * Melaksanakan tugas-tugas lain berkenaan dengan desa wisata. |
| Sekretaris I dan II | * Menyusun, mengumpulkan dan mengusahakan terciptanya tertib administrasi serta penyusunan laporan secara periodik. * Menyelesaikan pekerjaan kesekretariatan, menerima kedatangan wisatawan, membuat daftar wisatawan yang menginap, wisata desa dan memberi informasi kepada wisatawan. * Melaksanakan tugas-tugas lain berkenaan dengan desa wisata. |
| Bendahara I dan II | * Membantu belanja untuk keperluan makanan dan minuman   serta lainnya yang diperlukan dengan kedatangan wisatawan.   * Melaksanakan tugas-tugas lain berkenaan dengan desa wisata |
| Seksi-Seksi | * Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan bekerja secara profesional serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas. * Melaksanakan tugas-tugas lain berkenaan dengan desa wisata. * Menjalin kemitraan dan kerjasama |

Sumber: Analisis Anggaran Rumah Tangga, 2019

**Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT)**

Pengembangan CBT di desa wisata merupakan model CBT tingkat satu dimana seluruh masyarakat terlibat dalam aktifitas pengelolaan CBT secara aktif Suansri, P., (2003). Lebih lanjut dijelaskan oleh Ritchie, B.W.( 2000), tentang tujuan aktifitas pariwisata lebih menekankan pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat sebagai aktor lokal. Menurut analisis studi literatur, modal pengembangan CBT di Desa wisata terdiri atas beberapa komponen pendukung yaitu; 1) fasilitas dan aksesibilitas yang mendukung, 2) keuntungan kondisi geografis, 3) ketersediaan sumber daya manusia, 4) penerimaan masyarakat, 5) keunikan potensi dan inovasi produk, 6) sokongan dana sebagai modal finansial, 7), manajemen dan organisasi yang baik, 8) sistem marketing dan akses pasar yang matang, 9) kepemimpinan/ tokoh penggerak, 10) kemitraan yang kuat, serta didukung oleh faktor kunci yang menentukan kesuksesan CBT yaitu 11) keterlibatan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Berikut ilustrasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat (pemuda) sebagai aktor utama dalam pengelolaan CBT di desa wisata.

Broch, Harald B, 2013, dan Potjana (2003) menjelaskan bahwa Partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci kesuksesan CBT akan mendorong pengelolaan dan pemanfaatan yang maksimal dari kesepuluh modal CBT. Pembahasan tentang modal CBT berupa ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas yang mendukung, ketersediaan SDM dan penerimaan masyarakat telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Pembahasan tentang modal dan manfaat kesuksesan CBT yang lain akan diuraikan dalam hasil penelitian.

Gambar 3. Partisipasi Masyarakat sebagai Kunci Kesuksesan CBT

Sumber: Diolah Peneliti, 2019

**Keuntungan Kondisi Geografis**

Kondisi geografis desa wisata merupakan modal alamiah yang tersedia sebagai pemberian (*given*). Akses dan lokasi Dewi desa wisata yang strategis merupakan salah satu daya tarik wisata dan diuntungkan dengan kondisi geografis dan kekayaan sumber daya hayati yang menjadi potensi pengelolaan desa wisata. Kawasan Merapi-Merbabu menjadi salah satu dari 7 kawasan pengembangan pariwisata nasional di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Desa wisata berada di Kawasan Lereng Merapi bagian selatan yang menjadi titik kawasan pariwisata wilayah dalam peta wilayah destinasi wisata DIY dan Provinsi Jawa Tengah (RIPPDA, 2018). Kategori dan aktivitas pariwisata yang dikembangkan di desa wisata yang berbasis sosial, budaya dan alam yang berwawasan lingkungan.

Pengembangan potensi produk dan daya tarik wisata di desa lereng Merapi memperhatikan keunikan unsur-unsur lokal baik secara fisik maupun non-fisik. Potensi fisik yang dikembangkan berupa keunikan alam dan kondisi lingkungan, keragaman sumber daya hayati, pengolahan produk lokal (kuliner), serta produk hasil kerajinan. Sementara itu, potensi non-fisik yang dikembangkan berupa adat istiadat dan keramahtamahan, cara hidup masyarakat, mitos serta kondisi sosial budaya dan sejarah lokal.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat merupakan salah satu modal atraksi wisata di destinasi wisata, Suansri, P., (2003),. Kegiatan pertanian dalam paket atraksi agro wisata dikelola oleh dan untuk petani. Kegiatan peternakan dan perikanan juga dikelola oleh dan untuk peternak. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata di Desa lereng Merapi memiliki kapasitas untuk perbaikan langsung dan nyata bagi masyarakat lokal.

Selain memiliki nilai fungsi rekreasi, atraksi dan paket wisata memiliki nilai fungsi edukasi, toleransi, konservasi dan pelestarian.. Faktor pendorong partisipasi pemuda dalam mengembangkan CBT dianalisis dalam lima kategori utama. Kategori tersebut terdiri atas adanya organisasi yang sesuai, manfaat yang diterima, adanya ancaman, komitmen yang kuat serta adanya pengetahuan yang lebih baik. Berikut analisis faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan CBT dari 65 responden masyarakat.

Tabel 2 Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat CBT di Dewi Gendungan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Partisipasi | Bobot | Keterangan |
| 1 | Pengembangan Desa Wisata sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. | 246 | Tinggi |
| 2 | Memperoleh manfaat dari adanya desa wisata | 250 | Tinggi |
| 3 | Pengembangan desa wisata membantu mengatasi permasalahan hidup sehari-hari | 220 | Sedang |
| 4 | Mempunyai tanggung jawab serta kewajiban mengembangkan desa wisata | 260 | Tinggi |

Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Kesesuaian organisasi, manfaat yang diperoleh serta komitmen yang kuat merupakan faktor terbesar pendorong partisipasi masyarakat di Desa wisata. Masyarakat banyak terlibat secara suka kera dalam pembentukan dan pengelolaandesa wisata. Keberadaan desa wisata mampu menarik minat masyarakat untuk ikut terlibat, merasa bangga dan memiliki tanggung jawab untuk ikut mengelola desa wisata.

Kesediaan dan kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi dijiwai oleh rasa memiliki, tanggung jawab dan kebanggaan terhadapdesa wisata. Selain itu, dengan terlibat dalam kegiatan pengelolaan wisata, beragam keterampilan dan kemampuan meningkat seiring dengan partisipasi aktif pemuda. Berdasarkan faktor-faktor pendorong partisipasi tersebut, berikut alasan partisipasi pemuda didesa wisata.

Tabel 3 Alasan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan desa wisata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Bentuk Partisipasi | % | Ket. |
| 1. | Kesadaran sendiri dari masyarakat | 25 % | Tingkat Sedang |
| 2. | Diajak oleh orang lain dalam berpartisipasi | 60 % | Tingkat Sedang |
| 3. | Ikut ikutan dalam berpartisipasi | 12 % | Tingkat Tinggi |
| 4. | Tidak terllibat dalam berpartisipasi | 3 % | Tingkat Tinggi |
| 5. | Pemaksaan dalam berpartisipasi | 0 % | Tingkat Sedang |

Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Data dari tabel di atas menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat yang tinggal di desa wisata (60%) ikut berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata karena ajakan orang lain. Pada tingkat 25% masyarakat mengaku ikut berpartisipasi karena kesadaran sendiri, 12% berpartisipasi karena ikut-ikutan dan 3% masyarakat tidak berpartisipasi. Sementara itu, tidak satupun masyarakat (0%) yang ikut berpartisipasi karena paksaan atau desakan pihak lain. Kondisi tersebut terjadi karena masyarakat telah mendapatkan sosialisasi dan ajakan dari berbagai pihak untuk terlibat dala pengelolaandesa wisata. Peranan pemerintah desa serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis)

**Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT)**

Masyarakat lereng Merapi di Desa Kalibening, keterlibatan masyarakat ikut berpartisipasi dalam melaksanakan dan mengelola desa wisata. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata dapat dianalisis menjadi beberapa bentuk kegiatan. Salah satu analisis yaitu bentuk partisipasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas partisipasi berupa uang, harta benda, tenaga, keterampilan, buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta partisipasi refresentatif. Hasil analisis data kuesioner terhadap 50 responden masyarakat, menunjukkan bahwa bentuk partisipasi pemuda dalam mengembangkan CBT di desa wisata adalah senagai berikut sebagai beriku:

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyaratak (CBT)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bentuk Partisipasi | F | % | Ket. |
| 1. | Sumbangan dalam bentuk uang (kas / iuran) untuk pembangunan | 173 | 53,2 | Sedang |
| 2. | Sumbangan dalam bentuk harta benda (alat-alat kerja, perkakas, dll). | 177 | 54,5 | Sedang |
| 3. | Sumbangan tenaga (gotong royong) | 247 | 76 | Tinggi |
| 4. | Sumbangan dalam bentuk keterampilan (kerajinan, tari, pemandu, outbond, dll). | 255 | 78,5 | Tinggi |
| 5. | Sumbangan dalam bentuk pendapat, ide/ pandangan. | 182 | 54 | Sedang |

Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Hasil penghitungan distribusi frekuensi tabel diatas menunjukkan bahwa bobot rentang 275 – 327 merupakan skor bobot partisipasi sangat tinggi, rentang 222 – 274 partisipasi tinggi, rentang 169 – 221 partisipasi sedang, rentang 116 – 168 partisipasi rendah dan rentang 63 – 115 partisipasi sangat rendah. Tingkat partisipasi tinggi berada pada bentuk partisipasi tenaga sebesar 78,5%, bentuk partisipasi keterampilan sebesar 78,5%. Ttingkat partisipasi sedang berada pada bentuk partisipasi uang sebesar 53,2%, partisipasi harta benda sebesar 54,5 % dan partisipasi ide atau gagasan sebesar 54 %.

**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat**

Tingkat partisipasi masyarakat diukur menggunakan kategori dari teori partisipasi Arnstein (1969: 216-224) yang membagi tingkat partisipasi menjadi tiga kategori besar yaitu kategori tingkat partisipasi *non-participation*, *tokenism* dan *citizen power*. Kajian ini membatasi hanya 1 tingkatan yaitu Tingkat partisipasi awal atau tingkat partisipasi*.* Pada tingkat ini masyarakat sebagai objek publikasi mendapatkan informasi dan mengetahui setiap program pengelolaan Dewi Gendungan. Tingkat pemahaman pemuda tentang program pengelolaan Dewi Gendungan diukur berdasarkan uraian pada tabel berikut;

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Partisipasi Masyarakat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Partisipasi | Tingkat Pemahaman | F | % |
| 1 | Mengetahui program pengembangan Desa Wisata | Sangat Tahu | 10 | 15 |
| Tahu | 18 | 28 |
| Cukup Tahu | 18 | 28 |
| Kurang Tahu | 12 | 18 |
| Tidak Tahu | 7 | 11 |
| Jumlah | | | 65 | 100 |
| No | Partisipasi | Tingkat Intensitas | F | % |
| 2 | Mengikuti pelatihan di Desa Wisata | Selalu(>5 kali) | 8 | 12 |
| Sering(< 5 kali) | 16 | 25 |
| Kadang-kadang(3 kali) | 12 | 18 |
| Jarang(2 kali) | 9 | 14 |
| Tidak Pernah | 20 | 31 |
| Jumlah | | | 65 | 100 |

Sumber: Diolah Peneliti, 2019.

Sebagian besar masyarakat 71% mengetahui program pengelolaan Dewi Gendungan dengan tingkat pemahaman cukup tahu hingga sangat tahu. Sementara itu, persentase keterlibatan masyarakat dalam pelatihan di kategorikan dalam partisipasi sedang dengan bobot 55%. Kondisi tersebut didukung oleh keterlibatan masyarkat dalam pengelolaan Dewi Gendungan sehingga, akses informasi lebih mudah diterima. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi pemuda menunjukkan tingkat partisipasi sedang.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat Pengembangan program desa binaan Perdesaan Berbasis masyarakat di Desa Kalibening, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang ini merencanakan program yang disesuaikan dengan program pemerintah desa dan pemerintah daerah yang bersangkutan serta berbasis masalah yang ada sesuai tema yang diangkat. Program-program yang direncanakan pada dasarnya mengacu pemikiran jangka panjang sehingga bias berkelanjutan. Berikut kegiatan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat wilayah perdesaan di Desa Wisata Kalibening terutama prioritas di Dusun Gendungan Desa Kalibening sebagai lokasi program Pengembangan masyarakat binaan yang berlokasi di kawasan yang dekat dengan gunung berapi seperti Gunung Merapi memberikan ancaman yang menimbulkan bencana di wilayah lerengnya pada waktu-waktu tertentu.



Gambar 4. *Focus Group Disscussion* antara masyarakat lokal, pemeerintah daerah (dinas pariwisata) perguruan tinggi dalam perumusan perencanaan pariwisata partisipatif

Sumber: Dokumentasi penulis, 2018

Kemitraan yang terjalin antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam perencanaan tidak hanya dimaknai sebagai kemitraan semata. Hal ini juga merupakan bentuk jejaring sosial yang kuat baik secara internal maupun eksternal. Pengembangan kemitraan kedalam (internal) merupakan jejaring kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat di desa Kalibening baik secara personal maupun kelompok. Sementara itu, kemitraan keluar (eksternal) merupakan kemitraan yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait (*stake holder*). Pada tahapan perencanaan dengan metode *Focus Group Disscussion* yang dilakukan sangat membantu dalam upaya menjaring keinginan masyarakat desa melalui kegiatan perencanaan partisipatif. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut, pada table dibawah ini:

Tabel 6 Program dan solusi yang ditawarkan dalam pengembangan program

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program kegiatan/ permasalahan** | **Metode** | **Indikator capaian** |
| 1 | Inventarisasi obyek dan daya tarik wisata (Desa Kalibening) | Asessment (penilaian kelayakan) dan nilai jual daya tarik, Focus Group Discussion. | Partisipatif masyarakat dalam melakukan penilaian, mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas. |
| 2 | Pengemasan produk wisata (paket wisata) | Pelatihan dan studi banding SDM ke desa wisata di Jawa Tengah dan Yogyakarta. | Partisipatif masyarakat, tukar menukar informasi dalam studi banding dengan kelompok masyarakat sadar wisata di tempat lain, bertujuan menambah wawasan dan cara berpikir. Terbentuknya kesiapan masyarakat. |
| 3 | Dokumen master plan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. | Rumusan partisipatif, Focus Group Discussion. dan Usulan partisipatif dalam pengembangan desa wisata. | Dokumen rancangan master plan pengembangan pariwisata paartisipatif Desa Wisata di Desa Kalibening |

Sumber: Analisis, 2019

Konsep usulan solusi diatas sejalan dengan paradigma dan konsep-konsep pengembangan kepariwisataan yang berbasis kemasyarakatan secara partisipatif terus berkembang dan pentingnya pengembangan kepariwisataan, maka dipandang sangat perlu mengkaji dan menerapkan konsep pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis masyarakat untuk menyusun Konsep atau Master Plan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Kalibening, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Masyarakat mampu dalam menentukan kerangka berpikir inovatif dalam rangka menetapkan lokasi kegiatan dan kemungkinan pengembangan pada tahun berikutnya.



Gambar 5 : Pengembangan lokasi pariwisata bumi perkemahan di dusun Gendungan Kalibening Kecamatan Dukun

Sumber: Dokumentasi penulis, 2019

**Kesimpulan**

1. Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata mempunyai tingkatan partisipasi yang tinggi.
2. Masyarakat mampu dalam menentukan kerangka berpikir inovatif dalam rangka menetapkan lokasi kegiatan dan kemungkinan pengembangan pada tahapan berikutnya.
3. Kemitraan yang terjalin antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perencanaan tidak hanya dimaknai sebagai kemitraan semata karena merupakan bentuk jejaring sosial yang kuat baik secara internal maupun eksternal.
4. Pengembangan kemitraan kedalam (*internal*) merupakan jejaring kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat di desa Kalibening baik secara personal maupun kelompok

**Ucapan Terima Kasih**

1. Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Skema Pengembangan Desa Binaan dan Sub Direktorat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Antar Semester Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
2. Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Magelang dan Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang
3. Pemerintahan Desa Kalibening dan penggiat wisata Dusun Gendungan

**Daftar Pustaka**

Arikunto, S., 2010, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi 2010), Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, S., 1995, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, Yogyakata, Liberty.

Arnstein, S.R., (1969) , A Ladder of Citizen Participation”, Journal of the American Planning Association, Vol 35: 4, (1969) pp. 216 – 224.

Barry, N., Barham, J., 2012, Review of Existing Practices to Ensure Participation of Disaster-Affected Communities in Humanitarian Aid

Berke, P.; Beatley, 1997. T. After the Hurricane: Linking Recovery to Sustainable Development in the Caribbean; JohnsHopkins University Press: Baltimore, Maryland, USA,

Breugel, Liedewij van, 2013, *Community-Based tourism: Local Participation and Perceived Impacts*, Thesis: Faculty of Social Sciences-Radboud University Nijmegen.

Bridges, William R., 1974, *Citizen Participation in Community Development* (internet), Ohio State University Face Sheet, <http://ohioline.osu.edu/cd-fact/l700.html> (diakses 9 November 2015).

Broch, Harald B, 2013, *Social Resilience - Local Responses To Changes in Social and Natural Environments*, Maritim Studies Springer Open Journal (internet), Juni, 12 (6) hal. 1-17. http://www.maritimestudiesjournal.com> (diakses 25 September 2015).

Creswell, J. W., 2010, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar.

Baiquni, M, (2001), Participatory Rural Appraisal, Pendekatan dan Metode Partisipatif Dalam Pembangunan Masyarakat, National Training Session Cohort IX, Makalah disampaikan pada LEAD Leadership Environmental and Development , YPB Yayasan Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta.

Haeruman, H.J.S., Eriyatno, 2002, Kemitraan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal, Penerbit Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota dan Busines Inovation Centre Indonesia, Jakarta.

Muhamad, Fandeli Chafid (2009), Prinsip-prinsip Dasar Mengkonservasi Lanskap, Gadjah Mada University Press, Yogyakarata.

Muhamad. (2010), Kepariwisataan Berkelanjutan di Wilayah Yogyakarta Utara Setelah Erupsi 2010, (Interaksi Masyarakat di dalam Pengelolaan Lingkungan dan Kepariwisataan Alam), Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tidak diTerbitkan dan Tidak di Publikasikan, Yogyakarta.

Muhamad. (2014), Lanskap Kepariwisataan Alam di kawasan konservasi, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarata

Maha Neni Lodewijk, ), (2013) Participatory Rural Appraisal, Pendekatan dan Metode Partisipatif Dalam Pembangunan Masyarakat, Bandung

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA), 2015-2025, Pemerintah Kabupaten Magelang, 2018, Magelang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2015-2025, Pemerintah Kabupaten Magelang.

Ritchie, B.W.( 2000), Crisis and Disaster Management for Tourism; Channel View Publications: Bristol, UK,

Setyawan. B., Rahmi, D.H., Mitchell, B., (2000), Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Suansri, P., 2003, Community Based Tourism Handbook, Bangkok: Responsible Ecological Social Tour.

Wearing, S. dan Neil, J. 2009. Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities. Oxford: Elsevier. Weaver, D.B. (Ed.). 2001. The Encyclopedia of Ecotourism. Wallingford: CAB International.